

Analisis Kinerja Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Kantor Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

Aprilian Alvianto¹ Nurmasari²

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, Jl. Kharudin Nasution
No. 133 Perhentian Marpoyan, Pekanbaru, Indonesia
aprilianalvianto@student.uir.ac.id nurmasari@soc.uir.ac.id

Received : August 12, 2024;

Accepted : 10 August 2024

Abstract

This research aims to determine the performance in managing village funds at the Tualang Village Office, Tualang District, Siak Regency. This research is quantitative research and uses a descriptive survey, namely research with the aim of carrying out careful measurements of a social phenomenon, then the researcher develops concepts and collects data. Furthermore, research in the field uses questionnaires to collect data, where researchers are limited to data collected from samples to examine the entire population, thus complete survey research is research that takes samples from a population using questionnaires as the main data collection tool. Based on the Performance Principles in this research, it can be seen and assessed from five indicators which include Productivity, Service Quality, Responsiveness, Responsibility and Accountability which aims to determine the Performance and Obstacles in Village Fund Management at the Tualang Village Office, Tualang District, Siak Regency. The results of this research show that the management of village funds (DD) is quite good, but for the management of village funds at the Tualang Village Office, Siak Regency, there is low community participation, limited human resources, inadequate facilities and lack of communication between village officials and BAPEKAM. (BPD) and the village government to the community in Tualang Village, Tualang District, Siak Regency.

Key Words: Village Fund Management

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Kantor Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Penelitian ini bersifat Penelitian Kuantitatif dan menggunakan survey deskriptif yaitu penelitian dengan maksud untuk melakukan pengukuran secara cermat Konfrehensife terhadap suatu fenomena sosial, kemudian peneliti mengembangkan konsep dan pengumpulan data. Selanjutnya pada penelitian di lapangan menggunakan angket atau kuisisioner guna menghimpun data, dimana peneliti dibatasi pada data yang dikumpulkan dari sampel untuk meneliti seluruh populasi, dengan demikian penelitian survei secara komplit adalah penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dengan menggunakan kuesisioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok. Berdasarkan Prinsip Kinerja dalam penelitian ini dapat dilihat dan dinilai dari lima indikator yang meliputi Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsivitas, Responsibilitas, dan Akuntabilitas yang bertujuan untuk mengetahui Kinerja dan Hambatan dalam Pengelolaan Dana Desa di Kantor Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa (DD) sudah Cukup Baik tetapi untuk dalam Pengelolaan Dana Desa di Kantor Desa Tualang Kecamatan Kabupaten Siak yakni rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia, sarana yang kurang memadai serta kurangnya komunikasi antara Perangkat Desa dengan BAPEKAM (BPD) dan Pemerintah Desa kepada masyarakat di Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

Kata Kunci : Pengeloaan Dana Desa

Pendahuluan

Administrasi merupakan salah satu bentuk usaha dan aktivitas yang berhubungan dengan pengaturan kebijakan agar dapat mencapai tujuan organisasi. Menurut Dr. Sondang Siagian (2012;3) Administrasi dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Administrasi dapat dibagi menjadi dua pengertian yaitu kedalam arti sempit dan arti luas. Menurut Handyaningrat, Administrasi dalam arti sempit berasal dari kata *Administratie*, yaitu meliputi kegiatan mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, pengetikan, agenda, dan sebagainya yang bersifat teknik ketatausahaan. Sementara itu menurut Atmosudirjo, administrasi bisa ditinjau dari lingkup kerja sempit, yaitu hanya berkisar pada kegiatan tata usaha kantor (*office work*) seperti tulis-menulis, pengetikan, surat-menyurat, agenda, kearsipan, dan pembukuan. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian administrasi secara sempit adalah bentuk aktivitas dengan ketatausahaan kantor yang meliputi tulis-menulis dan pekerjaan kertas lainnya.

Menurut The Liang Gie, Administrasi secara luas merupakan sekrangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu kerja untuk mencapai tujuan tertentu. Sementara itu, menurut Sondang P. Siagian administrasi sebagai suatu proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu guna maencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan demikian, administrasi secara luas dapat dimaknai sebagai proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang mempunyai tujuan untuk mencapai target dengan memanfaatkan sarana dan prasarana secara berdaya guna dan berhasil guna.

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor yang untuk meningkatkan Produktivitas Kinerja suatu organisasi atau instansi. Oleh sebab itu, diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi tinggi karena keahlian atau kompetensi akan dapat mendukung peningkatan prestasi kinerja aparatur desa.

Peran Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) sendiri sangat berpengaruh terhadap Kinerja dari Aparatur Desa, karena Sumber Daya Manusia merupakan sumber daya yang paling penting dan sangat menentukan dalam kelangsungan hidup suatu perusahaan/organisasi.

Kualitas Kinerja dari Sumber Daya Manusia khususnya dalam Pengelolaan Dana D esa merupakan hal yang penting agar aparatur pemerintah desa dapat memiliki kinerja yang profesional dalam pengelolaan dana desa dan dapat mewujudkan masyarakat desa yang mandiri serta sejahtera.

Permasalahan pada aspek pembinaan pengelolaan dana desa antara lain belum adanya regulasi penetapan standar akuntansi pemerintahan desa dan belum adanya regulasi penyelenggaraan dan pembinaan aparatur desa yang lengkap, sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi.

Pengelolaan Keuangan Desa yang baik akan berpengaruh terhadap kemajuan suatu desa. Pengelolaan Keuangan Desa tidak hanya membutuhkan sumber daya manusia yang handal tetapi juga harus didukung oleh keuangan yang memadai. Pengelolaan keuangan desa

sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu desa karena mampu berkembang atau tidaknya, tergantung pada cara pengelolaan keuangannya. Pengelolaan keuangan desa yang baik akan menunjukkan kinerja pemerintah desa yang baik pula.

Pemerintah Desa harus dapat memanfaatkan dana peruntukannya guna memberikan nyata bagi masyarakat desa. Pemahaman mengenai pengelolaan dana desa menjadi aspek penting dan mendasar yang harus dimiliki kepala desa dan perangkat desa. Prinsip dasar pengelolaan dana desa dimulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa serta tugas dan tanggung jawab para pengelola.

Potensi permasalahan-permasalahan hukum dalam pendistribusian dan pemanfaatan dana desa yang sering ditemui di lapangan. Pada tahap pendistribusian, potensi permasalahan yang muncul dari pemerintah Kabupaten/Kota kepada Kepala Desa, antara lain adanya pemotongan, proyek-proyek pesanan, hanya dibagikan kepada para pendukung bupati/partai politik tertentu.

Perencanaan Dana Desa juga belum dilakukan berdasarkan pemetaan masalah dan kebutuhan desa. Pelaksanaan pembinaan program kegiatannya belum sepenuhnya selaras dengan skala prioritas penggunaan Dana Desa.

Sedangkan permasalahan pada aspek pengawasan pengelolaan Dana Desa, antara lain adalah mengenai perencanaan pengawasan oleh pemerintah daerah yang belum mempertimbangkan risiko. Hal itu terlihat dari masih adanya pemerintah daerah yang tidak memiliki rencana dan pemetaan masalah dalam pembuatan kegiatan pengawasan.

Menurut PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 60 Tahun 2014 pengertian Dana merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Istilah dana desa sendiri pertama kali muncul secara resmi dalam Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 tentang Dana sebagai satu dari tujuh sumber pendapatan desa.

Desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya dalam segala aspek baik dalam pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan masyarakat. Peranan pemerintah desa memang sangat dibutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya, inovasi-inovasi baru serta perhatian desa pada sarana dan prasarana desa juga sangat diperlukan demi terwujudnya pembangunan yang seutuhnya.

PMK 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa dan PMK 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024.

Jumlah masyarakat pada dasarnya suatu desa juga mempengaruhi kinerja aparatur desa dalam hal pelayanan publik di desa tersebut, karena semakin tinggi jumlah masyarakat maka tugas Aparatur Pemerintah Desa dalam melayani masyarakat juga semakin banyak. Hal ini membuat Pengelolaan Dana Desa tidak dapat berjalan secara optimal.

Berikut ini adalah Susunan Organisasi di Kantor Desa Tualang:

1. Kepala Desa

2. Sekretaris Desa
3. Kepala Seksi, membawahi:
 - a. Kasi Pemerintahan
 - b. Kasi Pelayanan
 - c. Kasi Kesejahteraan
4. Kepala Urusan, membawahi:
 - a. Kaur Keuangan
 - b. Kaur Umum
5. Pelaksana Kewilayahan, Kepala Dusun

Berdasarkan Fenomena yang saya temui disekitar Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, antara lain yaitu berdasarkan hasil pengamatan, penulis menemukan bahwa kurangnya produktivitas pengelolaan dana desa sehingga proyek yang didanai oleh dana desa terlambat atau tidak selesai tepat waktu, lambatnya tanggapan terhadap permintaan masyarakat seperti menanggapi keluhan masyarakat terkait pengelolaan dana desa untuk kepentingan public, pengelolaan dana desa tidak dimanfaatkan secara optimal, menyebabkan banyak proyek yang memerlukan biaya tambahan atau terhenti di tengah jalan. Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi di Provinsi Riau merupakan salah satu wilayah yang termasuk ke dalam unsur Negara Indonesia. Memiliki keunggulan di sektor pertanian khususnya sub sektor tanaman pangan, hortikultura, peternakan, kehutanan, perikanan dan perkebunan. Dengan sebagian besar masyarakat di Kecamatan Sentajo Raya bermata pencaharian sebagai petani.

Tinjauan Pustaka

Konsep Administrasi

Beberapa konsep teoritis yang dianggap mempunyai relevan terkait permasalahan Pengelolaan Dana Desa dalam Kantor Desa yang di teliti:

Konsep Administrasi adalah keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih berdasarkan rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. (dalam Siagian, 2000;32)

Konsep Organisasi merupakan unsur utama bagi sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu karena organisasi merupakan wadah atau tempat pengelompokan orang dan pembagian tugas sekaligus tempat berlangsungnya berbagai aktivitas bagi pencapaian tujuan (dalam Syafri,2012;12).

Konsep Manajemen adalah proses pencapaian tujuan melalui orang lain. Oleh karena itu, Manajemen merupakan rangkaian aktivitas menggerakkan sekelompok orang dalam organisasi untuk mencapai tujuan melalui pelaksanaan fungsi - fungsi manajemen. Organisasi baru akan bermakna jika telah berlangsung proses manajemen (dalam Solihin,2009:12).

Konsep Sumber Daya Manusia adalah Manajemen Sumber Daya Manusia adalah suatu kegiatan pengelolaan yang meliputi pendayagunaan, pengembangan, penilaian,

memberian balas jasa bagi yang manusia sebagai individu anggota organisasi atau perusahaan bisnis (Samsudin, 2010;22).

Kinerja adalah kuantitas dan kualitas hasil kerja individu atau sekelompok di dalam organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang berpedoman pada norma, standar operasional prosedur, kriteria dan ukuran yang telah ditetapkan atau yang berlaku dalam organisasi (Torang, 2014: 74).

Metode

Pendekatan Penelitian ini bersifat Penelitian Kuantitatif dan menggunakan survey deskriptif yaitu penelitian dengan maksud untuk melakukan pengukuran secara cermat dan komprehensif terhadap suatu fenomena sosial, kemudian peneliti mengembangkan konsep dan pengumpulan data. Selanjutnya pada penelitian di lapangan menggunakan angket atau kuesioner guna menghimpun data, dimana peneliti dibatasi pada data yang dikumpulkan dari sampel untuk meneliti seluruh populasi, dengan demikian penelitian survei secara komplit adalah penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok. Dan penelitian survei ini akan menuntun peneliti dalam membuat daftar pertanyaan berupa kuesioner yang dimaksud diatas untuk disebarkan kepada sampel yang sudah ditentukan (Singarimbun: 1989:3).

Hasil dan Pembahasan

Pada hasil pembahasan ini akan dilakukan pemaparan Hasil Penelitian dan dilakukan juga Pembahasan dari Tanggapan Responden dan ada beberapa Indikator yang penulis paparkan dalam Penelitian yang berjudul Analisis Kinerja dalam Pengelolaan Dana Desa pada Kantor Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

Produktivitas

Berdasarkan Hasil Kuesioner, Wawancara dan Observasi, penulis menyimpulkan bahwa Tanggapan Perangkat Desa indikator Produktivitas berada pada kategori "Cukup Baik" dengan persentase 52,75%. Hal ini dikarenakan Pemerintah Desa sudah merasa jumlah proyek yang didanai dana desa sudah mencukupi kebutuhan desa serta untuk meningkatkan efektif dan efisien dalam mengelola Dana Desa yang diperlukan oleh masyarakat setempat.

Dari Hasil penyebaran Kuesioner dan Observasi, Penulis menyimpulkan bahwa Tanggapan Responden Masyarakat Indikator Produktivitas berada pada kategori "Cukup Baik" dengan persentase 58,75%. Hal ini Pemerintah desa harus meneliti dan mengidentifikasi apa yang dibutuhkan masyarakat. kemudian perangkat harus mengawasi kinerja proyek sesuai waktu. selanjutnya pemerintah desa dalam program harus sesuai ketentuan Rencana kerja dalam mengelola dana desa.

Kualitas Layanan

Berdasarkan hasil dari penyebaran kuesioner, wawancara dan observasi, Penulis menyimpulkan bahwa Tanggapan Perangkat Desa indikator Kualitas Layanan berada pada kategori "Cukup Baik" Dengan persentase 54,16%. Hal ini dikarenakan Pemerintah Desa dalam Kualitas Layanan sudah terlaksana, berusaha melayani keluhan masyarakat. Sebagai contoh melayani masyarakat dalam mengusulkan Bantuan sosial misalnya PKH.

Dari Hasil penyebaran koesioner dan observasi, penulis menyimpulkan bahwa indikator Kualitas Layanan berada dalam kategori “Cukup Baik” dengan persentase 56,25%. Hal ini dikarenakan pemerintah desa dalam melayani masyarakat sesuai ketentuan Pelayanan Publik untuk membantu masyarakat dalam mengurus bantuan yang dibutuhkan masyarakat contohnya: dalam mengurus Bantuan Sosial PKH.

Responsivitas

Berdasarkan hasil dari penyebaran koesioner, wawancara dan observasi, penulis menyimpulkan bahwa indikator Responsivitas berada pada kategori “Cukup Baik” Dengan persentase 58,33%. Hal ini dikarenakan Pemerintah Desa dalam merespon apa keluhan dan saran dari masyarakat dalam menemukan solusi yang terbaik. Pemerintah desa juga memiliki mekanisme yang jelas untuk menerima dan menindaklanjuti setiap masukan dari warga Desa Tualang. Setiap Keluhan akan di tinjau secara serius, dan upaya-upaya akan dilakukan untuk menemukan solusi yang tepat dalam menyelesaikan masalah tersebut.

Dari Hasil penyebaran koesioner dan observasi, penulis menyimpulkan bahwa indikator Responsivitas berada dalam kategori “Baik” dengan persentase 77,5%. Hal ini dikarenakan Pemerintah Desa berkewajiban untuk berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat, dalam hal keluhan maupun saran dari masyarakatnya, Setiap Rapat atau musyawarah selalu meminta dari masyarakat tetapi di wakikan oleh RT/RW, Kepala Dusun dan Tokoh Masyarakat apa yang dikeluhkan sama masyarakat serta masukan untuk desa yang lebih baik.

Responsibilitas

Berdasarkan hasil dari penyebaran koesioner, wawancara dan observasi, penulis menyimpulkan bahwa indikator Responsibilitas berada pada kategori “Cukup Baik” dengan persentase 62,5%. Hal ini dikarenakan Pemerintah Desa dalam mengelola dana desa dan menyelesaikan proyek dengan sangat baik. Pemerintah Desa memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa Dana Desa digunakan secara Transparan, Efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ketika pemerintah desa ini dengan baik, hasilnya adalah proyek-proyek yang berhasil diselesaikan, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa, dan memperkuat infrastruktur dan perekonomian lokal.

Berdasarkan hasil dari penyebaran koesioner, wawancara dan observasi, penulis menyimpulkan bahwa indikator Responsibilitas berada pada kategori “Cukup Baik” dengan persentase 56,25%. Hal ini dikarenakan Pemerintah Desa dalam mengelola dana desa dan menyelesaikan proyek dengan sangat baik. Pemerintah Desa memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa dana desa digunakan secara Transparan, Efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ketika pemerintah desa ini dengan baik, hasilnya adalah proyek-proyek yang berhasil diselesaikan, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa, dan memperkuat infrastruktur dan perekonomian lokal.

Akuntabilitas

Berdasarkan hasil dari penyebaran Koesioner, Wawancara dan Observasi, penulis menyimpulkan bahwa indikator Akuntabilitas berada pada kategori "Cukup Baik" dengan persentase 62,5%. Hal ini dikarenakan Pemerintah Desa membuat kebijakan tentang Dana Desa sesuai dengan APBDesa seperti pada bidang pembangunan yang terlaksana semua akan tetapi ada pembangunan yang kurang maksimal sebagai contoh Jalan Permukiman

(Semenisasi) karena kekurangan bahan baku seperti semen. Perangkat Desa dalam mempertanggungjawabkan realisasi dana desa kepada masyarakat disampaikan melalui musyawarah desa, baliho serta papan Informasi seperti mading meskipun jarang diperbaharui dan bahkan tidak diisi.

Dari Hasil Penyebaran Koesioner dan Observasi, penulis menyimpulkan bahwa indikator Akuntabilitas berada dalam kategori "Baik" dengan persentase 75%. Hal ini dikarenakan Pemerintah Desa membuat kebijakan tentang Dana Desa sesuai dengan APBDesa seperti pada bidang Pembangunan yang terlaksana semua akan tetapi ada pembangunan yang kurang maksimal sebagai contoh Jalan Permukiman (Semenisasi) karena kekurangan bahan baku seperti semen Perangkat Desa dalam mempertanggungjawabkan realisasi Dana Desa kepada masyarakat disampaikan melalui Musyawarah Desa, baliho serta papan Informasi seperti mading meskipun jarang diperbaharui dan bahkan tidak diisi.

Kesimpulan

Berdasarkan Analisis penulis yang didapat dari observasi, hasil wawancara serta koesioner yang disebarakan kepada responden dari penelitian Analisis Kinerja dalam Pengelolaan Dana Desa di Kantor Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perangkat Desa di Kantor Desa Pemerintah Desa sudah merasa jumlah proyek yang didanai Dana Desa sudah mencukupi kebutuhan desa serta untuk meningkatkan efektif dan efisien dalam mengelola dana desa yang diperlukan oleh masyarakat setempat. Pemerintah Desa dalam Kualitas Layanan sudah terlaksana, berusaha melayani keluhan masyarakat. Sebagai contoh melayani masyarakat dalam mengusulkan Bantuan sosial misalnya PKH. Pemerintah Desa dalam merespon apa keluhan dan saran dari masyarakat dalam menemukan solusi yang terbaik. Ketika saat rapat (musyawarah) biasa ada Perwakilan dari masyarakat seperti RT/RW, BAPEKAM (BPD), atau Tokoh masyarakat untuk perwakilan dari masyarakat dalam mengungkap masalah yang ada di desa tersebut. Pemerintah Desa juga memiliki mekanisme yang jelas untuk menerima dan menindaklanjuti setiap masukan dari warga Desa Tualang. Setiap Keluhan akan di tinjau secara serius, dan upaya-upaya akan dilakukan untuk menemukan solusi yang tepat dalam menyelesaikan masalah tersebut. Pemerintah Desa dalam mengelola Dana Desa dan menyelesaikan proyek dengan sangat baik. Pemerintah Desa memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa dana desa digunakan secara Transparan, Efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah Desa membuat kebijakan tentang Dana Desa sesuai dengan APBDesa seperti pada bidang pembangunan yang terlaksana semua akan tetapi ada pembangunan yang kurang maksimal. sebagai contoh Jalan Permukiman (Semenisasi) karena kekurangan bahan baku seperti semen. Perangkat Desa dalam mempertanggungjawabkan Realisasi Dana Desa kepada masyarakat disampaikan melalui musyawarah desa, baliho serta papan Informasi seperti mading meskipun jarang diperbaharui dan bahkan tidak diisi serta Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
2. Selain itu penelitian menemukan ada beberapa hambatan Analisis Kinerja dalam Pengelolaan Dana Desa di Kantor Desa Tualang Kecamatan Kabupaten Siak yakni rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia, sarana yang

kurang memadai serta kurangnya komunikasi antara perangkat desa dengan BPD dan pemerintah desa kepada masyarakat masyarakat.

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal:

- Adidasma, R. 2006. Pengembangan Desa Aspiratif. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Afriana Vitortika (2021), Evaluasi Kinerja Pegawai Dalam Meningkatkan Pelayanan di Kantor Camat Enok Kabupaten Indragiri Hilir.
- Andry, Henry dan Yussa, Tarmizi. 2015. Perilaku & Etika Administrasi Publik. Pekanbaru, Marpoyan Tujuh Publishing.
- Ayu, Sri Eva. 2018. Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas Dan Rasio Pertumbuhan Pada Kantor Desa Jampu Kabupaten Soppeng. Makassar. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- BPKP. 2015. Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta. BPKP. Dana Desa Di Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung 2008). Tesis. Pasca Sarja Universitas Diponegoro Semarang.
- Enda Permata (2016), Analisis Kinerja Pegawai Kantor Camat Kecamatan Pelawan Kabupaten Sorangun Tingkat Kinerja.
- Fitri. 2015. Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Vatunonju
- Herjuliani (2017), Analisis Kinerja Pegawai Pada Kantor Kelurahan Melayu Kota Piring Tanjung Pinang. (Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, Vol. 9 No. 2, November 2018).
- Indrawati, Sri Mulyani. 2017. Buku Saku Dana Desa. Jakarta: Pustaka Fiskal.
- Kementrian Keuangan RI. 2017. Buku Pintar Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat. Jakarta.
- Laia, Gairah. 2019. Analisis Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa.
- Mangkunegara, A.P. 2005. Evaluasi Kinerja. Bandung: Refika Aditama.
- Mondy, R. Wayne. 2008. Manajemen Sumber Daya Manusia, Jilid 1 Edisi 10. Jakarta: PT Erlangga
- Mosii. Sjafrudin. 2015. Pengelolaan Keuangan Desa. Badan Pemeriksaan Keuangan RI, Jakarta Pusat
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87.

- Handrian, E., Muslikhah, U., & Rosmita, R. (2024). Diffusion of Application Policy Innovation Pekan Kita (PEKA) in Pekanbaru City. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1).
- Andry, H., & Handrian, E. (2017, November). E-Implementation of E-Government In Regional Financial Management (Study at the Regional Finance and Asset Management Board of Riau Province). In *International Conference on Democracy, Accountability and Governance (ICODAG 2017)* (pp. 152-155). Atlantis Press.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Handrian, E. (2019). Pengaruh Reformasi Birokrasi Terhadap Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi Golongan C (Sim C) Pada Sat Lantas Polresta Pekanbaru. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 137-155.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Penguatan Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Di Kabupaten Kepulauan Meranti. *Jurnal Kemunting*, 1(2), 183-203.
- Handrian, E., & Hawa, S. (2022). Implementasi program pengembangan perikanan tangkap pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 10(1), 49-58.
- Nurman, Yusriadi, Y., & Hamim, S. (2022). Development of pluralism education in Indonesia. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 9(3), 106-120.
- Nasri, H., Nurman, N., Azwirman, A., Zainal, Z., & Riauan, I. (2022). Implementation of collaboration planning and budget performance information for special allocation fund in budget planning in the regional development planning agency of Rokan Hilir regency. *International Journal of Health Sciences (IJHS) Ecuador*, 6(S4), 639-651.
- Nurman, N., Zainal, Z., & Rajasa, Y. (2021). Good Governance in Structure Belantik Raya People's Market in Siak District. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 7(2), 1-11.
- Nurman, M. P. (2015). Strategi Pembangunan Daerah.
- Rusli, R., & Nurman, N. (2016). Implementasi Fungsi Koordinasi Camat Dalam Pembuatan Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk Di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 2(1), 27-39.
- Parjiyana, P. (2015). Implementasi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2004 Tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 1(2), 41-54.
- Fista, L., & Parjiyana, P. (2024). Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Kuantan Babu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 26-36.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun

Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.

- Afhissa, C., & Parjiyana, P. (2017). Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pimpinan di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK) Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 207-223.
- Marcella, A., & Parjiyana, P. (2018). ANALISIS PELAYANAN UMUM DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA INDRA KABUPATEN INDRAGIRI HULU. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 17-35.
- Suriani, L., Nisa, K., & Affandi, L. H. (2023). Pelaksanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Tema Gaya Hidup Berkelanjutan di Sekolah Dasar. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(3), 1458-1463.
- Suriani, L., & Lumintang, G. (2018). Pengaruh Kompensasi, Disiplin Kerja Dan Etika Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di Pt. Transindo Jaya Bahari Maumbi Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 6(4).
- Suriani, L., & Sidabutar, O. J. (2019). Kualitas Pelayanan Dan Peraturan Tata Tertib Perpustakaan Terhadap Kepuasan Pemustaka Di Perpustakaan Soeman Hs. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 190-197.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Syafitri, I., & Suriani, L. (2019). Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 44-54.
- Hamim, S., Vianda, L., & Pitaloka, S. (2020). Penerapan Prinsip Prinsip Pelayanan Publik Di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 1-10.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi.
- Hamim, S. (2005). Sistem Perencanaan Strategis Dalam Pembangunan.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2014). Filsafat Ilmu, Ilmu Pengetahuan dan Penelitian.
- Andry, H., & Yussa, A. T. (2015). Perilaku dan Etika Administrasi Publik. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87.
- Andry, H. (2017). Pelayanan Publik Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan

- Mandau Oleh Dinas Tata Kota, Tata Ruang Dan Pemukiman Kabupaten Bengkalis. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 66-79.
- Andry, H., & Zulkifli, Z. (2023). Evaluasi pengelolaan parkir oleh dinas perhubungan kota pekanbaru. *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(02), 194-205.
- Andry, H., Herman, H., & Rahmah, J. (2023). PELAKSANAAN KOORDINASI DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU DAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PEKANBARU DALAM PENGHAPUSAN ASET KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KHUSUS (AMBULANCE). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 12(1), 18-28.
- Abdullah, S., Hamim, S., & Ermayuna, S. (2021). Strategi Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan Di Lahan Gambut Desa Pulau Palas Kabupaten Indragiri Hilir. *Pascasarjana Ilmu Administrasi Universitas Islam Riau*, 1-83.
- Anggara, B., & Abdullah, S. (2017). Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Gas Lpg 3 Kg Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 248-261.
- Ariswanto, N. S., & Abdullah, S. (2016). Analisis Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Di Desa Berumbung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(2), 197-215.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau Province. *PERSPEKTIF*, 13(1), 164-173.
- Abdullah, S., & Safri, I. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengelola Potensi Masyarakat Desa Kampung Panjang Kabupaten Kampar. *Masyarakat Berdaya dan Inovasi*, 4(2), 242-248.
- Nurmasari, N., & Al Hafis, R. I. (2019). Desentralisasi Asimetris: Kemiskinan ditengah kelimpahan otonomi khusus papua. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 5(2), 1180-1192.
- Nurmasari, N., Komalasari, E., Muliando, B., Nurman, N., & Amrillah, M. F. (2024). PELATIHAN INOVASI BANK SAMPAH PLASTIK UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN EKONOMI MASYARAKAT DI BANK SAMPAH PUAN SARI MANDIRI. *Jurnal ADAM: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 35-40.
- Kurniawan, R., & Nurmasari, N. (2017). Analisis Kinerja Pegawai Pada Bidang Pelayanan Dan Informasi Di Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 122-134.
- Afringgo, R., Nurmasari, N., & Zubaidah, E. (2021). Efektifitas E-Warong sebagai Sarana Pengintegrasian Tujuan Program Keluarga Harapan pada Kelompok Target KUBE Berkah Harapan di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik)*, 1(1), 22-29.
- Nurmasari, N., & Wedayanti, M. D. (2018, August). HUMAN RESOURCE MANAGEMENT CIVIL SERVANT EMPLOYEES IN THE FRAMEWORK OF REFORM BUREAUATION IN RIAU PROVINCE. In *ICSScE 2018*.

- Herman, H., Suriani, L., & Farisha, N. (2021). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sampah Pada Pasar Milik Pemerintah Kota Pekanbaru. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 9(2), 81-90.
- Herman, H. (2019). Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Oleh Stakeholders Primer Dan Skunder Di Riau. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 2(2).
- Herman, H., & Novarizal, R. (2017). Faktor-faktor ideal perusahaan dalam pelaksanaan CSR (Corporate Social Responsibility). *Sisi Lain Realita*, 2(2), 39-53.
- Nengsih, I. A., & Herman, H. (2019). Strategi Pelayanan Izin Praktek Dokter Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru. *Asketik*, 3 (2), 163–175.
- Novarizal, R., & Herman, H. (2019). Pengamanan Lembaga Pemasayarakatan Terhadap Kemungkinan Terjadinya Pelarian (Studi Kasus Lapas Kelas II A Pekanbaru): Universitas Islam Riau. *Sisi Lain Realita*, 4(1), 90-102.
- Suri, D. M. (2017). Analisis faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penertiban dan pembinaan gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 89-101.
- Suri, D. M., & Nurmandi, A. (2021, July). Deep learning methods as a detection tools for forest fire decision making process fire prevention in Indonesia. In *International Conference on Human-Computer Interaction* (pp. 177-182). Cham: Springer International Publishing.
- Suri, D. M., Nurmandi, A., Qodir, Z., & Al Fadhat, F. (2021). Narrative Policy Framework: The Role Of Media Narrative Towards Forest And Land Fire Policy In Indonesia. *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- Hildawati, H., & Suri, D. M. (2020). Potensi UEK-SP Kelurahan Rimba Sekampung Untuk Transformasi Menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Di Kota Dumai. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 24-42.
- Yogia, M. A., & Suri, D. M. (2020). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Kelurahan. *Sosio Konsepsia*, 9(03), 247-256.
- Al Hafis, R. I., & Yogya, M. A. (2017). Abuse of power: Tinjauan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik di Indonesia. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 80-88.
- Hafis, A., Imam, R., Hakim, A., & Haryono, B. S. (2014). Aktor Pelaksana Pengelolaan Transportasi Publik Perkotaan (Studi Kasus Bus Trans Metro Di Kota Pekanbaru). *Jurnal Wacana*, 16(4), 171-178.
- Al Hafis, R. I. (2018). Pembangunan Daerah Perbatasan Yang Terabaikan: Kajian Perbatasan Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis–Selat Malaka. *Gema Publica*, 3(2), 111-119.
- Al Hafis, R. I., Warsono, H., Larasati, E., & Purnaweni, H. (2021). The paradox of collaborative governance in leprosy rehabilitation in Central Java. *Management and Entrepreneurship: Trends of Development*, 3(17), 55-67.

- Al Hafis, R. I., Wardana, D., Setiawati, S., & Putra, A. I. (2024). Proses Collaborative Governance untuk Mengurangi Dampak Abrasi. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 7(1), 521-529.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Zubaidah, E., & Lubis, E. F. (2021). Inovasi Layanan Aplikasi e-Samsat Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Riau. *Jurnal Niara*, 14(2), 120-125.
- Zubaidah, E. (2018). Analisis Manajemen Perkantoran Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai PT. Pegadaian Persero Kantor Wilayah II Pekanbaru. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Administrasi Perkantoran*.
- Zubaidah, E., Nurmandi, A., Pribadi, U., Hidayati, M., & Lubis, E. F. (2022, March). The Factors Influencing the Community to Use E-Service in Pekanbaru City, Indonesia. In *International Conference on Public Organization (ICONPO 2021)* (pp. 310-318). Atlantis Press.
- Zubaidah, E. (2016). MANAJEMEN PANTI ASUHAN DALAM PERSPEKTIF HENRI FAYOL:(STUDY KASUS PANTI ASUHAN USMAN BIN AFFAN). *VALUTA*, 2(1), 130-139.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Pulungan, B. I. (2022). Political Interaction Strategy Corporate Social Responsibility of PT Riau Andalan Pulp and Paper in Riau Province, Indonesia. *International Journal of Sustainable Development & Planning*, 17(8).
- Wedayanti, M. D., & Susanti, H. (2019). Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (CBT) Menggunakan Kontribusi Corporate Social Responsibility (CSR) di Pekanbaru Provinsi Riau. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 5(2), 32-37.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Juliana, S. (2021, January). Implementation of Corporate Social Responsibility in PT. Riau Andalan Pulp and Paper in Pelalawan District, Riau Province. In *INCEESS 2020: Proceedings of the 1st International Conference on Economics Engineering and Social Science, InCEESS 2020, 17-18 July, Bekasi, Indonesia* (p. 71). European Alliance for Innovation.
- Wedayanti, M. D., & Zulkifli, Z. (2015). Pelaksanaan Pengawasan Barang dan Jasa Beredar Oleh Seksi Perlindungan Konsumen Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 52-72.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.

- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2019). Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Dalam Mewujudkan Prinsip Tridaya Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 156-163.
- Lubis, E. F. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (Pnpm Mpd)(Studi Kasus: Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Di Nagari Tanjung Betung Kabupaten Pasaman). *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(2), 304-317.
- Lubis, E. F., & Indira, T. T. (2023). PENGARUH STORE ATMOSPHERE TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA AYAM PENYET CINDELARAS BAGAN BATU KABUPATEN ROKAN HILIR. *PubBis: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*, 7(1), 1-9.
- Lubis, E. E. F. (2024). PELATIHAN PEMBUATAN SABUN CUCI PIRING UNTUK MENINGKATKAN TAMBAHAN PENDAPATAN PADA IBU-IBU KELOMPOK MELATI PUTIH DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN SUKAJADI KOTA PEKANBARU. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 1(1), 120-126.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau Province. *PERSPEKTIF*, 13(1), 164-173.
- Handrian, E., Rosmita, R., Suriani, L., & Kartius, K. (2022). Reformasi Badan Usaha Milik Desa Kesumbo Sejahtera di Desa Kesumbo Ampai Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 231-237.
- Kurniawan, A. (2020). Pengaruh Kepemimpinan Diri Sendiri Terhadap Sikap Wirausaha Pada Usaha Makanan Tradisional Di Desa Palung Raya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 179-191.
- Kurniawan, A., Rezki, D., & Riau, U. I. (2023). Collaborative Governance Dalam Menangulangi Banjir di Kota Sungai Penuh Collaborative Governance in Overcoming Floods in the City of Sungai Penuh. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 9(1), 1-18.
- TARMIZI, A., KURNIAWAN, A., ADERISKA, M., & AFRIZAL, T. (2022). Analysis of Quality Electronic Identity Card Service in Sub-District West Meral of Karimun District, Riau Islands (Integrated Sub-District Administration Service Model "Paten"). *International Journal of Society, Development and Environment in the Developing World*, 6, 62-72.
- Tarmizi, A., & Kurniawan, A. (2017). Model Administrasi Pribumi Masyarakat Adat Melayu Petalangan di Desa Sialang Godang Kabupaten Pelalawan Riau. In *Seminar Nasional "Mitigasi dan Strategi Adaptasi Dampak Perubahan Iklim di Indonesia"* (pp. 165-177).
- Yusa, A. T., Andry, H., & Kurniawan, A. (2016). Restorasi Paradigma KUD:" Pendekatan Teori Organisasi Dalam Merebut Peluang MEA".
- Yunisman, Y., Salioso, H., Febrianto, S., Prayuda, R., & Mardatillah, A. (2022). Analysis of

quality of animal health services by veterinary medical and veterinary paramedic services in food security and agricultural agency of Rokan Hilir Regency. *International Journal of Health Sciences*, 14(3), 1030-1046.

Larasati, D., Indrastuti, S., Salioso, H., Yussa, H. A., & Suri, D. M. (2022). Analysis of the effect of job satisfaction and job motivation on the performance of cleaning officers at the environmental service agency Rokan Hilir district Indonesia. *International Journal of Health Sciences*, 6(4), 573-588.

Salioso, H. (2016). ASN, OTDA, Politik Pilkada Serentak dan Korupsi di Indonesia. *SISI LAIN REALITA*, 1(1), 01-07.

Adha, M. L., & Salioso, H. (2024). KINERJA ORGANISASI DI KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BASARNAS KELAS A PEKANBARU. *JURNAL KEMUNTING*, 5(1), 1-16.

Askarial, A., Rinaldi, K., & Salioso, H. (2016). Kota Dumai Dalam Pidato Seorang Walikota.

Handrian, E., Muslikhah, U., & Rosmita, R. (2024). Diffusion of Application Policy Innovation Pekan Kita (PEKA) in Pekanbaru City. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1).

Handrian, E., & Putriani, S. (2021). Reformasi Administrasi Pelayanan Publik di Kantor Camat Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 9(2), 143-154.

Handrian, E., Rosmita, R., Suriani, L., & Kartius, K. (2022). Reformasi Badan Usaha Milik Desa Kesumbo Sejahtera di Desa Kesumbo Ampai Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 231-237

Regulasi:

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

PP Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN

Pria Bintang Aditama, Nina Widowati (2013), Analisis Kinerja Organisasi Pada Kantor Kecamatan Blora). Kinerja Organisasi, Produktivitas, Penggunaan sumberdaya dan Sarana Prasarana. *Jurnal Eksis Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro*.

Subroto, Agus. 2009. Akuntabilitasn Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus

Pengelolaan Alokasi.

Sulistia Wardani (2021), Analisis Kinerja Aparatur Pemerintah Desa di Desa Hangtuh Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar.

Wibowo. 2017. Manajemen Kinerja. Edisi kelima. Rajawali Pres. Depok.

<https://risehtunong.blogspot.com/2018/05/5-siklus-pengelolaan-keuangandes.html>

<https://www.spssindonesia.com/2017/04/makna-koefisien-determinasirsquare.html>

Tim Penyusun, 2013, Buku Pedoman Penulis. Pekanbaru, Badan Penerbit FISIPOL UIR

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang: Desa

Aprilian Alvianto dan Nurmasari

Journal of Public Administration Review Vol. 1 No. 2 / 2024

956

Peraturan Pemerintah (PP) Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 tentang: Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang: Pengelolaan Dana Desa